

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Profil dan
Kebijakan
Teknis
Inspektorat
Jenderal
Kementerian
Pertanian

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan bebas dari KKN pada Kementerian Pertanian melalui pengawasan yang efektif dan akuntabel. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan memiliki pegawai sebanyak 287 orang mempunyai tugas dan fungsi sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Melalui kebijakan pengawasan yang lebih bersifat preventif, dan pre-emptif adanya kesalahan maupun terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Melalui peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada Permentan No. 43 Tahun 2014 terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV dan Inspektorat Investigasi.

A. 1.1 VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL

1. VISI

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian serta sebagai suatu tujuan atau cita-cita bersama di masa yang akan datang, Inspektorat Jenderal menetapkan visi yaitu ***"Menjadi pengawas Intern mitra proaktif pengelola program pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani"***.

2. MISI

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.

- b. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.
- c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

A.1.2. TUJUAN

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut, tujuan kegiatan pengawasan adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan kematangan (maturitas) penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

A.1.3. SASARAN

Berdasarkan visi, misi dan tujuan diatas, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pengawasan intern sebagai berikut :

1. Meningkatkan Indeks akuntabilitas pembangunan pertanian
2. Meningkatkan nilai maturitas penerapan SPI Kementerian Pertanian
3. Meningkatkan Internal Audit Capability Model (IA-CM) Inspektorat Jenderal.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Audited Itjentan Tahun Anggaran 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Instansi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan

SIMAK-BMN adalah Sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Audited Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2017 ini merupakan laporan konsolidasi dari satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, yang secara struktural berada di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Jumlah satuan kerja di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah satu satuan kerja yaitu satker Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Inspektorat Jenderal menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat peristiwa dan transaksi itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Audited Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pendapatan LO pada Inspektorat Jenderal adalah Pendapatan Denda dan Pendapatan lainnya.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai yang tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman pada KMK No.620/KM.6/2015 tentang masa manfaat dalam rangka Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud (ATB) pada entitas Pemerintah Pusat .
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos- pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun- akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah mengadakan 15 kali revisi POK. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp79.343.730,00

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode 31 Desember 2017 adalah senilai Rp79.343.730,00 atau mencapai 528,96 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp15.000.000,00. Pendapatan Negara dan Hibah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian merupakan PNBPN yang terdiri dari Pendapatan Lelang dan Pendapatan Lain-lain.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tidak memiliki potensi PNBPN, sehingga estimasi pendapatan tahun 2017 hanya ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00, namun karena adanya pendapatan lelang dan pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) yang cukup besar sehingga pendapatan per 31 Desember 2017 mencapai 529 persen.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2017

Akun	Uraian	31 Desember 2017	
		Anggaran	Realisasi
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	-	62,188,000
4237	Pendapatan luran dan denda	-	1,314,551
4239	Pendapatan Lain-lain	15,000,000	15,841,179
Total		15,000,000	79,343,730

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2017 senilai Rp79.343.730,00, yang terdiri dari :

- a. Pendapatan dan Pengelolaan BMN senilai Rp62.188.000,00 yaitu:
 - Pendapatan Lelang 1 unit kendaraan roda 4 yang kondisinya sudah rusak berat senilai Rp30.500.000,00, dengan Risalah Lelang No.011/2017 tanggal 18 Januari 2017.
 - Pendapatan Lelang 7 unit kendaraan roda 2 yang kondisinya sudah rusak berat senilai Rp16.100.000,00 dengan Risalah Lelang

No.018/2017 tanggal 23 Januari 2017.

- Pendapatan Lelang aset peralatan dan mesin yang kondisinya sudah rusak berat senilai Rp8.888.000,00, dengan Risalah Lelang No.277/26/2017 tanggal 25 September 2017.
 - Pendapatan Lelang aset peralatan dan mesin yang kondisinya sudah rusak berat senilai Rp6.700.000,00, dengan Risalah Lelang No.276/26/2017 tanggal 25 September 2017.
- b. Pendapatan luran denda senilai Rp1.314.551,00
- c. Pendapatan lain lain senilai Rp15.841.179,00 terdiri dari :
- c.1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp12.941.112,00, yaitu :
- Pendapatan senilai Rp7.660.039,00 dari Pengembalian kelebihan Tunjangan Fungsional Tahun Anggaran 2016.
 - Pendapatan dari pengembalian tunjangan jabatan struktural pegawai ex.PPMP senilai Rp5.280.000,00 yang dipotong melalui potongan SPM Gaji senilai Rp440.000,00 per bulan (bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017).
 - Pembulatan dari aplikasi gaji senilai Rp1.073,00.
- c.2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp2.900.000,00, yang merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas Tahun Anggaran 2016.
- c.3. Pendapatan anggaran lain-lain senilai Rp67,00.

**Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Akun	URAIAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan / Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	62,188,000	103,348,990	(41,160,990)	(39.83)
423752	Denda Keterlambatan	1,314,551	4,065,435	(2,750,884)	(67.67)
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	12,941,112	36,707,400	(23,766,288)	(64.75)
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	2,900,000	93,767,008	(90,867,008)	(96.91)
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	67	380,885	(380,818)	(99.98)
		Rp 79,343,730	Rp 238,269,718	(158,925,988)	(66.70)

Berdasarkan Tabel diatas Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2017 mengalami penurunan senilai Rp158.925.988,00 atau 66,70% jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2016.

Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2017 tidak terdapat pengembalian belanja uang makan bulan Desember 2016, sebab uang makan bulan Desember 2016 telah diperhitungkan sebelumnya pada tahun 2016 dan pendapatan dari hasil lelang lebih kecil dibandingkan tahun 2016. Pada Tahun 2017 tidak terdapat Realisasi Pengembalian Pendapatan.

Realisasi Belanja
Negara
Rp85.720.888.115,00

B.2. BELANJA

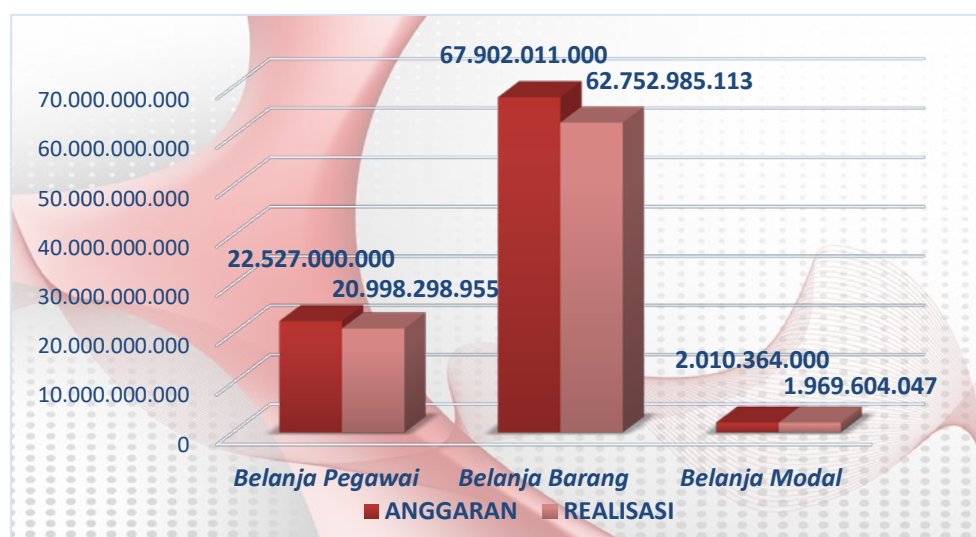
Realisasi Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (netto) per 31 Desember 2017 senilai Rp85.720.888.115,00 atau 92,73% dari anggaran senilai Rp92.439.375.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja senilai Rp1.155.657.961,00. Dan capaian output per 31 Desember 2017 adalah 100%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
51	Belanja Pegawai	22,527,000,000	21,005,262,635	93.24
52	Belanja Barang	67,902,011,000	63,901,679,394	94.11
53	Belanja Modal	2,010,364,000	1,969,604,047	97.97
Total Belanja Kotor (Bruto)		92,439,375,000	86,876,546,076	93.98
Pengembalian Belanja			(1,155,657,961)	
Total Belanja Bersih (Netto)		92,439,375,000	85,720,888,115	92.73

Komposisi anggaran dan realisasi belanja (Netto) per 31 Desember 2017 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Perbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

KODE JENIS BELANJA	URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI BELANJA (Rp)		KENAIKAN / PENURUNAN	
		31 Desember 2017	31 Desember 2016	Rp	%
51	Belanja Pegawai	20,998,298,955	21,995,643,928	(997,344,973)	(4.53)
52	Belanja Barang	62,752,985,113	53,284,004,691	9,468,980,422	17.77
53	Belanja Modal	1,969,604,047	2,170,852,850	(201,248,803)	(9.27)
Jumlah Belanja		85,720,888,115	77,450,501,469	8,270,386,646	10.68

Realisasi belanja (netto) Tahun Anggaran 2016 per 31 Desember 2016 sebesar Rp77.450.501.469,00 atau 82% dari pagu anggaran. Rendahnya realisasi anggaran tahun 2016 antara lain disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan anggaran berupa penghematan anggaran. Sesuai kebijakan tersebut, anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 dihemat atau tidak bisa dicairkan sebesar Rp2.389.800.000,00.

Realisasi Belanja (netto) Tahun anggaran 2017 per 31 Desember 2017 sebesar Rp85.720.888.115,00 atau 92,73% dari pagu anggran. Realisasi Belanja (Netto) yang berakhir 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp.8.270.386.646,00 atau 10,68 % dari realisasi per 31 Desember 2016.

Belanja Pegawai
Rp20.998.298.955,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai (netto) adalah Realisasi Belanja Pegawai pertanggal laporan setelah dikurangi pengembalian belanja pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai (netto) per 31 Desember 2017 senilai Rp20.998.298.955,00 atau sebesar 93,21% dari Pagu Anggaran senilai Rp22.527.000.000,00.

**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan
Sub Kelompok Belanja per 31 Desember 2017**

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	14,802,085,000	14,621,080,300	98.78
Belanja Pembulatan Gaji PNS	216,000	172,864	80.03
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1,175,295,000	1,027,215,130	87.40
Belanja Tunjangan anak PNS	356,559,000	312,918,966	87.76
Belanja Tunjangan Struktural PNS	442,510,000	440,650,000	99.58
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,672,970,000	1,608,450,000	96.14
Belanja Tunjangan PPH PNS	272,920,000	93,088,439	34.11
Belanja Tunjangan Beras PNS	832,565,000	733,351,680	88.08
Belanja Uang Makan PNS	2,044,730,000	1,324,503,256	64.78
Belanja Tunjangan Umum PNS	320,840,000	282,550,000	88.07
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	476,710,000	473,320,000	99.29
Belanja Uang Lembur	129,600,000	87,962,000	67.87
Jumlah Belanja Kotor	22,527,000,000	21,005,262,635	93.24
Pengembalian Belanja Pegawai		(6,963,680)	
Jumlah Bersih	22,527,000,000	20,998,298,955	93.21

Pengembalian Belanja senilai Rp6.963.680,00 merupakan pengembalian belanja pegawai tahun berjalan yang terdiri dari ; realisasi belanja pembulatan gaji PNS senilai Rp1.480,00 (otomatis dari aplikasi); kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional senilai Rp3.640.000,00; dan kelebihan pembayaran honor untuk 1 bulan seorang tenaga honorer senilai Rp3.322.200,00, karena yang bersangkutan pindah ke Setjen.

Realisasi Belanja Pegawai (netto) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing senilai Rp20.998.298.955,00 dan Rp21.995.643.928,00.

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp997.344.973,00 atau 4,53% dibandingkan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan ada beberapa pegawai Ijtenta yang pensiun sehingga realisasi belanja pegawai menurun.

**Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	14,621,080,300	15,297,690,580	(676,610,280)	(4.42)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	172,864	179,919	(7,055)	(3.92)
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1,027,215,130	1,088,154,740	(60,939,610)	(5.60)
Belanja Tunjangan anak PNS	312,918,966	329,518,864	(16,599,898)	(5.04)
Belanja Tunjangan Struktural PNS	440,650,000	449,810,000	(9,160,000)	(2.04)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,608,450,000	1,695,910,000	(87,460,000)	(5.16)
Belanja Tunjangan PPH PNS	93,088,439	303,530,991	(210,442,552)	(69.33)
Belanja Tunjangan Beras PNS	733,351,680	776,968,200	(43,616,520)	(5.61)
Belanja Uang Makan PNS	1,324,503,256	1,217,780,000	106,723,256	8.76
Belanja Tunjangan Umum PNS	282,550,000	309,015,000	(26,465,000)	(8.56)
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	473,320,000	436,555,000	36,765,000	8.42
Belanja Uang Lembur	87,962,000	129,599,000	(41,637,000)	(32.13)
Jumlah Belanja Kotor	21,005,262,635	22,034,712,294	(1,029,449,659)	(4.67)
Pengembalian Belanja Pegawai	(6,963,680)	(39,068,366)	(32,104,686)	
Jumlah Bersih	20,998,298,955	21,995,643,928	(997,344,973)	(4.53)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Barang pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja barang.

Realisasi Belanja Barang (*Netto*) per 31 Desember 2017 adalah senilai Rp62.752.985.113,00 atau 92,42% dari Pagu Anggaran senilai Rp67.902.011.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja barang senilai Rp1.148.694.281,00.

**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan
Sub Kelompok Belanja per 31 Desember 2017**

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Keperluan Perkantoran	630.990.000	602.020.810	95,41
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	64.001.000	63.857.924	99,78
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	77.171.000	68.768.500	89,11
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	299.160.000	298.639.500	99,83
Belanja Bahan	1.523.332.000	1.032.561.250	67,78
Belanja Honor Output Kegiatan	219.600.000	73.900.000	33,65
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.290.034.000	1.086.755.200	84,24
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.210.894.000	1.123.808.557	92,81
Belanja Langganan Telepon	55.440.000	37.598.226	67,82
Belanja Sewa	587.682.000	244.366.800	41,58
Belanja Jasa Profesi	629.900.000	483.300.000	76,73
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	257.500.000	252.256.550	97,96
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.848.590.000	1.646.414.163	89,06
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.200.000	44.429.000	94,13
Belanja Perjalanan Biasa	48.429.497.000	47.827.215.597	98,76
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	867.750.000	625.250.000	72,05
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.178.745.000	3.310.829.200	79,23
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.319.850.000	4.788.443.007	90,01
Belanja Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	364.675.000	291.265.110	79,87
Jumlah Belanja Kotor	67.902.011.000	63.901.679.394	94,11
Pengembalian Belanja Barang		(1.148.694.281)	
Jumlah Belanja Bersih	67.902.011.000	62.752.985.113	92,42

Pengembalian belanja barang senilai Rp1.148.694.281,00 adalah pengembalian belanja barang tahun berjalan yang terdiri dari; Belanja

Bahan senilai Rp80.000,00; Belanja Barang persediaan konsumsi senilai Rp150.000,00; Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri senilai Rp1.080.385.565,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri senilai Rp68.078.716,00.

Realisasi Belanja Barang (*Netto*) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp62.752.985.113,00 dan Rp53.284.004.691,00.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp9.468.980.422,00 atau 17,77% dibandingkan realisasi belanja barang per 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan karena target fisik hasil kegiatan (*output*) tahun 2017 naik sehingga alokasi penganggaran dan realisasi belanja barang meningkat.

**Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi		Kenaikan / Penurunan	
	31 Desember 2017	31 Desember 2016	(Rp)	%
Belanja Keperluan Perkantoran	602.020.810	902.912.154	(300.891.344)	(33,32)
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	63.857.924	196.214.336	(132.356.412)	(67,46)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Ros Pusat	68.768.500	108.147.000	(39.378.500)	(36,41)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	298.639.500	263.600.000	35.039.500	13,29
Belanja Barang Operasional	-	60.325.000	(60.325.000)	(100,00)
Belanja Bahan	1.032.561.250	126.552.000	906.009.250	715,92
Belanja Honor Output Kegiatan	73.900.000	79.155.000	(5.255.000)	(6,64)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.086.755.200	872.716.500	214.038.700	24,53
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.123.808.557	1.374.475.745	(250.667.188)	(18,24)
Belanja Langganan Telepon	37.598.226	51.067.036	(13.468.810)	(26,37)
Belanja Sewa	244.366.800	359.456.000	(115.089.200)	(32,02)
Belanja Jasa Profesi	483.300.000	299.000.000	184.300.000	61,64
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	252.256.550	227.486.700	24.769.850	10,89
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.646.414.163	1.790.100.469	(143.686.306)	(8,03)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.429.000	107.071.550	(62.642.550)	(58,51)
Belanja Perjalanan Biasa	47.827.215.597	39.739.828.235	8.087.387.362	20,35
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	625.250.000	1.007.930.000	(382.680.000)	(37,97)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.310.829.200	907.541.000	2.403.288.200	264,81
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.788.443.007	4.677.914.400	110.528.607	2,36
Belanja Perjalanan Lainnya- Luar Negeri	291.265.110	337.825.370	(46.560.260)	(13,78)
Jumlah Belanja Kotor	63.901.679.394	53.489.318.495	10.458.921.159	19,55
Pengembalian Belanja Baran	(1.148.694.281)	(205.313.804)	(943.380.477)	
Jumlah Belanja Bersih	62.752.985.113	53.284.004.691	9.468.980.422	17,77

Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

Rp1.547.089.707,00

B.2.3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*Netto*) per 31 Desember 2017 adalah senilai Rp1.547.089.707,00 atau sebesar 97,50 persen dari Pagu Anggaran senilai Rp1.586.804.000,00. Tidak terdapat pengembalian belanja modal peralatan dan mesin.

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Berdasarkan Sub Kelompok Modal per 31 Desember 2017**

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.579.964.000	1.540.249.707	97,49
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	6.840.000	6.840.000	100,00
Jumlah Belanja Kotor	1.586.804.000	1.547.089.707	97,50
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	1.586.804.000	1.547.089.707	97,50

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*Netto*) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.547.089.707,00 dan Rp2.076.307.850,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp529.218.143,00 atau 25,49% dibandingkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2016.

Hal ini disebabkan karena adanya efiseinsi pengadaan belanja modal di Tahun Anggaran 2017.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,540,249,707	2,070,277,850	(530,028,143)	(25.60)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	6,840,000	6,030,000	810,000	-
Jumlah Belanja Kotor	1,547,089,707	2,076,307,850	(529,218,143)	(25.49)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	-	-
Jumlah Belanja Bersih	1,547,089,707	2,076,307,850	(529,218,143)	(25.49)

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0,00

B.2.4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (*Netto*) per 31 Desember 2017 adalah nihil karena pada Tahun 2017 tidak ada anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (*Netto*) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp0,00 dan Rp94.545.000,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	94.545.000	(94.545.000)	-
Jumlah Belanja Kotor	-	94.545.000	(94.545.000)	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	-	94.545.000	(94.545.000)	-

Belanja Modal
Lainnya
Rp422.514.340,00

B.2.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Modal Lainnya pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Modal Lainnya.

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya (*Netto*) per 31 Desember 2017 adalah Rp422.514.340,00 atau sebesar 99,75 persen dari pagu anggaran senilai Rp423.560.000,00. Tidak terdapat pengembalian belanja modal fisik lainnya.

Belanja Modal Aset Lainnya yang berupa sistem Aplikasi Pengawasan, Aplikasi Pemantauan Kinerja (SIMANJA) dan Aplikasi E-Reviu Dokumen seluruhnya telah selesai sesuai dengan kontrak.

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
Berdasarkan Sub Kelompok Modal per 31 Desember 2017**

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	423.560.000	422.514.340	99,75
Jumlah Belanja Kotor	423.560.000	422.514.340	99,75
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja Bersih	423.560.000	422.514.340	99,75

Realisasi Belanja Modal Lainnya (*Netto*) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah Rp422.514.340,00 dan nihil, karena pada tahun 2016 tidak terdapat alokasi anggaran dan realisasi belanja modal lainnya.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	422.514.340	-	422.514.340	-
Jumlah Belanja Kotor	422.514.340	-	422.514.340	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	422.514.340	-	422.514.340	-

